

DINAMIKA EKOLOGI PEMERINTAHAN: PENGARUH DIMENSI WAKTU, RUANG, DAN KONTEKS TERHADAP HUBUNGAN TIMBAL BALIK SISTEM PEMERINTAHAN DAN VISI MISI ORGANISASI

A. Pendahuluan

Dalam kajian ekologi pemerintahan, pemerintah tidak hanya dipandang sebagai mesin birokrasi tunggal yang kaku, melainkan sebagai sebuah organisme hidup (living organism) yang terus berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Salah satu wujud nyata dari interaksi ekologis ini ada pada perumusan visi dan misi organisasi pemerintahan. Secara ekologis, visi dan misi organisasi pemerintah memiliki pengaruh timbal balik yang sangat kuat dengan sistem pemerintahannya. Visi dan misi ini berfungsi sebagai fondasi yang menentukan apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sebuah entitas pemerintah di masa depan.

Interaksi ekologis tersebut pada gilirannya akan menentukan bentuk, susunan, dan budaya dari organisasi pemerintahan itu sendiri, yang pada dasarnya merupakan wadah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan. Namun, visi dan misi ini tidak berdiri di ruang hampa; eksistensinya sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh lingkungan internal dan eksternalnya. Tiga dimensi utama yang memengaruhi interaksi ini adalah dimensi waktu (temporal), dimensi ruang (spatial), dan dimensi konteks (contextual).

B. Fokus Makalah

Makalah ini difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan visi dan misi organisasinya melalui kacamata ekologis. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah utama: Secara ekologis, visi, dan misi organisasi pemerintah berpengaruh timbal balik dengan sistem pemerintahannya, karena visi dan misi menentukan tindakan dan bentuk susunan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara spesifik, makalah ini akan menjawab dan menguraikan secara tepat menggunakan contoh kasus tiga pertanyaan turunan berikut:

1. Bagaimana pengaruh dimensi waktu dalam hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan visi dan misi organisasi?

2. Bagaimana pengaruh dimensi ruang dalam hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan visi dan misi organisasi?
3. Bagaimana pengaruh dimensi konteks dalam hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan visi dan misi organisasi?

C. Pembahasan

Hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan visi dan misi organisasinya merupakan proses yang dinamis. Visi mencerminkan rumusan umum mengenai keadaan masa depan yang diinginkan, sementara misi adalah langkah konkret untuk mewujudkannya. Dalam realitas ekologi pemerintahan, pencapaian visi dan misi ini senantiasa dibatasi dan diarahkan oleh dimensi waktu, ruang, dan konteks. Berikut adalah penjabarannya:

D.1 Pengaruh Dimensi Waktu dalam Hubungan Timbal Balik

Sistem Pemerintahan dengan Visi Misi Organisasi Dilihat dari dimensi waktu (temporal), visi dan misi sebuah organisasi pemerintahan terikat erat pada kurun waktu tertentu dan tidak bersifat abadi. Artinya, apabila visi dan misi tersebut sudah tercapai pada akhir periode perencanaannya, maka visi misi itu akan ditinggalkan untuk kemudian dibuat rumusan visi dan misi baru yang lebih menantang sesuai dengan tuntutan zaman. Dimensi waktu ini sangat krusial karena menentukan kesinambungan, komitmen jangka panjang, serta sinkronisasi antara siklus politik dengan siklus perencanaan strategis. Dimensi waktu dalam visi ini sering kali dinyatakan secara eksplisit (misalnya tertera pada judul dokumen perencanaan) maupun secara implisit (tergambar dalam narasi naskah), kemudian Dimensi Waktu memiliki dinamika dalam kerangka tertentu sehingga menjadikan sebuah Visi Misi Organisasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Contoh Kasus: Sebuah pemerintah daerah atau nasional menyusun Visi Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (misalnya RPJPN/RPJPD). Rencana jangka panjang ini kemudian disinkronisasikan dan dipecah menjadi siklus 5 tahunan (RPJMN/RPJMD) yang disesuaikan dengan masa jabatan politik seorang kepala daerah dan diselaraskan dengan apa yang akan dicapai presiden. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan politik (siklus 5 tahunan), dimensi waktu 20 tahun tersebut mengikat sistem pemerintahan untuk tetap menjaga keselarasan visi pembangunan berkelanjutan. Mekanisme evaluasi berkala dan perencanaan multi-tahap ini hadir untuk menjaga dan memastikan bahwa tujuan jangka panjang pemerintah tidak dirusak oleh perubahan kepentingan politik jangka pendek.

D.2 Pengaruh Dimensi Ruang dalam Hubungan Timbal Balik

Sistem Pemerintahan dengan Visi Misi Organisasi Dalam dimensi ruang (spatial), visi dan misi organisasi pemerintahan selalu disusun untuk menargetkan wilayah atau ruang yurisdiksi tertentu, seperti visi organisasi pemerintah skala nasional (pusat) maupun subnasional (daerah/provinsi/kabupaten). Dimensi ruang ini berlaku secara hierarkis dan berjenjang ke bawah; visi dan misi pada ruang yurisdiksi yang lebih besar atau tinggi (pusat) mutlak memengaruhi dan harus menjadi rujukan utama bagi visi dan misi organisasi pemerintah yang ruang yurisdiksinya lebih rendah (daerah). Selain itu, batas-batas administratif wilayah, skala regional, serta kedekatan geografis dapat bertindak sebagai fasilitator yang memperkuat, atau justru menjadi penghambat dalam kerja sama pencapaian visi antar-wilayah.

Contoh Kasus: Pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) di Indonesia. Ketika Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Kutai Barat menetapkan visi pembangunannya, visi tersebut harus tunduk dan merujuk pada visi pembangunan ruang nasional Pemerintah Pusat. Selanjutnya, visi Pemerintah Desa di bawahnya harus bersinergi dengan visi Kabupaten tersebut. Contoh operasionalnya terlihat pada tata kelola lingkungan kawasan regional (seperti masalah sampah atau transportasi di kawasan Sendawar (Kecamatan Barong Tongkok, Melak, dan Sekolaq Darat) atau Kampung / Desa di wilayah Kecamatan Barong Tongkok, Melak, dan Sekolaq Darat); sistem pemerintahan yang memiliki batas administratif yang kaku seringkali menghambat integrasi visi. Namun, bagi daerah-daerah yang berhasil membentuk kedekatan geografis melalui kerja sama antardaerah (inter-municipal cooperation), mereka mampu menyelaraskan visi ruang secara efektif demi efisiensi layanan publik.

D.3 Pengaruh Dimensi Konteks dalam Hubungan Timbal Balik

Sistem Pemerintahan dengan Visi Misi Organisasi Dilihat dari dimensi konteks (contextual), visi dan misi yang memengaruhi tata kelola sistem pemerintahan dapat dibedakan fungsinya berdasarkan konteks spesifik yang sedang dihadapi. Visi dan misi ini dapat dikategorikan menjadi visi misi pemerintahan (tata kelola birokrasi), visi misi pembangunan (ekonomi dan sosial), hingga visi misi tata ruang. Bahkan, wujud visi dan misi tersebut sangat dipengaruhi oleh status atau posisi aktor politiknya yakni dibedakan antara visi misi dalam konteks kampanye pencalonan kepala daerah, dengan visi misi yang ditetapkan setelah kepala daerah tersebut secara sah terpilih dan terintegrasi ke dalam dokumen resmi birokrasi. Selain itu, dimensi konteks juga menyoroti bagaimana ukuran organisasi, adopsi teknologi,

dan dinamika kekuasaan ikut memoderasi keberhasilan integrasi visi dan misi dengan sistem pemerintahan.

Contoh Kasus: Seorang calon Walikota membawa visi-misi politik saat masa kampanye (Pilkada). Dalam konteks pencalonan, visinya bersifat sangat politis dan populis. Namun, ketika ia terpilih dan beralih ke dalam konteks pemerintahan resmi, visi dan misinya harus dilembagakan dan diselaraskan dengan kapasitas anggaran, infrastruktur, serta regulasi birokrasi (dijabarkan ke dalam Renstra/RPJMD). Contoh lain dari dimensi konteks adalah inovasi teknologi (digital governance). Sebuah organisasi pemerintahan berskala besar yang menghadapi konteks turbulensi teknologi (misal tuntutan Smart City) dipaksa untuk mengadaptasi visi dan misinya, menggunakan kepemimpinan transformasional agar sistem pemerintahannya tetap relevan dan mampu memberikan layanan publik yang responsif.

D. Kesimpulan

Sebagai sebuah organisme yang hidup, sistem pemerintahan memiliki hubungan yang sangat erat dan timbal balik dengan visi dan misi yang dijelankannya. Visi dan misi mengarahkan struktur serta kinerja penyelenggara negara. Analisis ekologis menunjukkan bahwa eksistensi visi dan misi ini dikendalikan oleh tiga dimensi fundamental. Dimensi Waktu memberikan batas durasi pencapaian yang terukur (S.M.A.R.T) serta mensinkronkan program jangka panjang negara dengan siklus kepemimpinan yang pendek. Dimensi Ruang menegaskan berlakunya hierarki yurisdiksi, di mana visi institusi yang lebih tinggi menjadi landasan bagi ruang di bawahnya, seraya menuntut perlunya kerja sama melampaui sekat-sekat geografis-administratif. Terakhir, Dimensi Konteks memastikan visi dan misi dapat diadaptasi sesuai jenis kepentingannya (kampanye vs. pemerintahan resmi) serta responsif terhadap dinamika internal organisasi seperti adopsi teknologi dan struktur kekuasaan.

E. Daftar Referensi

1. Andrews, R. (2017). Organizational size and social capital in the public sector: Does decentralization matter? *Review of Public Personnel Administration*, 37(1), 40–58. <https://doi.org/10.1177/0734371X16643575>
2. Badghish, S., & Soomro, Y. A. (2024). Artificial intelligence adoption by SMEs to achieve sustainable business performance: Application of technology–organization–environment framework. *Sustainability*, 16(5), Article 1864. <https://doi.org/10.3390/su16051864>
3. Beck, T. E., Solansky, S. T., Davis, D. J., & Ford-Eickhoff, K. (2024). Temporal adaptive capacity: A competency for leading organizations in temporary interorganizational

- collaborations. *Group & Organization Management*, 49(1), 114–140. <https://doi.org/10.1177/10596011221110080>
4. Bunjak, A., Bruch, H., & Černe, M. (2022). Context is key: The joint roles of transformational and shared leadership and management innovation in predicting employee IT innovation adoption. *International Journal of Information Management*, 66, Article 102516. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102516>
 5. Chen, J., & Tajdini, S. (2025). A moderated model of artificial intelligence adoption in firms and its effects on their performance. *Information Technology and Management*, 26(3), 407–419. <https://doi.org/10.1007/s10799-024-00422-5>
 6. De Pourcq, K., & Verleye, K. (2022). Governance dynamics in inter-organizational networks: A meta-ethnographic study. *European Management Journal*, 40(2), 273–282. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.05.003>
 7. Elazhary, M., Popovič, A., Henrique de Souza Bermejo, P., & Oliveira, T. (2023). How information technology governance influences organizational agility: The role of market turbulence. *Information Systems Management*, 40(2), 148–168. <https://doi.org/10.1080/10580530.2022.2055813>
 8. Ferina, I. S., Mulyani, S., Afiah, N. N., & Poulus, S. (2021). The realization of good public governance through the adoption of information technology innovation and the organizational culture at regional public hospital in South Sumatera. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(Special Issue 4), 1–11.
 9. Hutt, C., & Gopalakrishnan, S. (2020). Leadership humility and managing a multicultural workforce. *South Asian Journal of Business Studies*, 9(2), 251–260. <https://doi.org/10.1108/SAJBS-08-2019-0147>
 10. Inchauspe, J., MacDonald, G., & Kobir, M. A. (2022). Wagner’s law and the dynamics of government spending on Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 79–95. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1811837>
 11. Ledingham, J. A., Bruning, S. D., & Wilson, L. J. (1999). Time as an indicator of the perceptions and behavior of members of a key public: Monitoring and predicting organization–public relationships. *Public Relations Review*, 25(2), 167–183. https://doi.org/10.1207/s1532754xjpr1102_04
 12. Philip, J., Gilli, K., & Knappstein, M. (2023). Identifying key leadership competencies for digital transformation: Evidence from a cross-sectoral Delphi study of global managers. *Leadership & Organization Development Journal*, 44(3), 392–406. <https://doi.org/10.1108/LODJ-02-2022-0063>
 13. Ranjan, P. (2026). Does digital transformation foster innovation outcomes? Examining the contingent effects of technological turbulence and structural flux. *European*

Journal of Marketing. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/EJM-03-2025-0203>

14. Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Jager, N. W., Newig, J., & Weber, E. (2020). How does collaborative governance evolve? Insights from a medium-n case comparison. *Policy and Society*, 39(4), 617–637. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1769288>
15. van Meerkerk, I., & Edelenbos, J. (2014). The effects of boundary spanners on trust and performance of urban governance networks: Findings from survey research on urban development projects in the Netherlands. *Policy Sciences*, 47(1), 3–24. <https://doi.org/10.1007/s11077-013-9181-2>
16. Wang, X., Liu, Z., Li, J., & Lei, X. (2023). How organizational unlearning leverages digital process innovation to improve performance: The moderating effects of smart technologies and environmental turbulence. *Technology in Society*, 75, Article 102395. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102395>
17. Yuningsih, N. Y. (2026). Modul 3: Lingkungan Internal Sistem Pemerintahan (Bagian I) [Presentasi PowerPoint]. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Learning Management System Universitas Terbuka, Universitas Terbuka.